

**PERWUJUDAN PRINSIP KERJASAMA, SOPAN SANTUN, DAN IRONI
PARA PEJABAT DALAM PERISTIWA RAPAT DINAS
DI LINGKUNGAN PEMKOT BERBUDAYA JAWA**

Harun Joko Prayitno

Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, FKIP, Unmuh Surakarta
Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102
email: *harunjpums@yahoo.com*

ABSTRACT

This research aims at identifying and realizing TTD related to show the maxim in PKS, PSS, and PI. The type of this research is qualitative with sociopragmatics perceptive. This study was done in the local government of Surakarta City. The object of this research is the form of TTD which is used by the staff of the local government of Surakarta City in the context of PKS, PSS, and PI in their formal meeting. The data sources of this research are all leaders of unit, branch office, village, biro, institution under controlled by local government of Surakarta City that are selected by using purposive sampling and criterion based selection. The techniques for data collecting are basic record technique continued with free content analysis (simak bebas libat cakap) technique. Interpretation and data analysis is done by using intralingual and extralingual equivalence continued with sociopragmatic analysis work of means-end Searle model and Grice heuristic model, suavity scale model by Brown-Levinson, Blum-Kulka model, and Leech model. The results of the research show that PKS maxims developed by functionary based on Javanese culture is shown through sub-sub maxim of directive clarity, directive truth, evidence sufficiency, directive accuracy, directive inaccuracy, sequence directive strategy. The suavity directive is based on the ways of suavity making indirectly, fencing, and pessimism instead of using some ways to minimize the force, respect, apology, and impersonal, statements, refinement signal. PI strategy which is developed by the functionary in Local Government of Surakarta City which based on Javanese Culture tends to take more between PKS and PSS, so the form of insincereness, impatience, irritate statement, minimizing statement, and the Bronx cheer expression which is shown through TTD which like polite although exactly not polite.

Key word: *direktive utterance, extralingual, illocution, maxim, mark, sociopragmatic.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memerikan realisasi TTD dalam kaitannya dengan perwujudan maksim-maksim dalam PKS, PSS, dan PI.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan ancangan sosiopragmatik. Penelitian dilakukan di lingkungan Pemkot Surakarta. Objek penelitian ini berupa perwujudan TTD yang digunakan oleh pejabat dalam konteks PKS, PSS, dan PI pada PRD. Sumber data penelitian meliputi keseluruhan individu yang mengepalai suatu badan, dinas, cabang dinas, kantor, kalurahan, instansi di lingkungan Pemkot Surakarta yang ditentukan secara purposive sampling dan criterion based selection. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dasar sadap dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan teknik padan intralingual dan ekstralingual yang dilanjutkan dengan kerja analisis sosiopragmatik means-end model Searle dan heuristik model Grice, skala kesantunan model Brown-Levinson, model Blum-Kulka, dan model Leech. Temuan penelitian menggambarkan bahwa maksim-maksim PKS yang dikembangkan oleh pejabat belatar belakang budaya Jawa ditampakkan melalui sub-submaksim kejelasan direktif, kebenaran direktif, kecukupan bukti, ketepatan direktif, ketidaktaksaan direktif, keruntutan strategi direktif. Kesantunan direktif lebih didasarkan pada cara-cara kesantunan tak langsung, berpagar, dan pesimisme daripada dengan cara-cara meminimalkan paksaan, penghormatan, meminta maaf, dan impersonal, pernyataan-pertanyaan, isyarat halus. Strategi PI yang dikembangkan oleh pejabat di lingkungan pemkot berbudaya Jawa lebih banyak mengambil tempat di antara PKS dan PSS sehingga betuk ketidaktulusan, ketidaksabaran, pernyataan menggelikan, pernyataan mengecilkan, maupun bentuk cemooh halus ditampakkan melalui TTD yang seakan-akan sopan meskipun sejatinya tidak sopan.

Kata Kunci: tindak tutur direktif, ekstralingual, ilokusi, maksim, pemarkah, sosiopragmatik.

1. Pendahuluan

Tindak tutur direktif (TTD) adalah tindak tutur yang digunakan oleh penutur (P_n) untuk menyatakan maksud yang berupa keinginan atau harapan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi mitra tutur (M_t) dalam bertindak dan atau tidak bertindak. Dengan demikian, TTD pada dasarnya menghendaki bentuk verbal yang sesuai dengan fungsi dan maksud TTD yang diinginkan oleh P_n . Untuk mencapai maksud yang diharapkan tersebut tindak direktif harus dapat memerikan hubungan status dan peran pelaku tutur. Peran dan status pelaku tutur itulah yang kemudian berkaitan dengan status dan kekuasaan P_n - M_t . Hal demikian yang menyebabkan kedudukan seseorang dalam peristiwa rapat-rapat ke-

dinasan berkorelasi dengan status sosial dan kekuasaan struktur atau eselon yang disandanginya.

Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan itu. Rumusan ini menunjukkan bahwa pelaku yang memiliki kekuasaan dapat berupa seseorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Jadi, seseorang (A) dinyatakan memiliki kekuasaan atas yang lainnya (B) jika seseorang itu (A) dapat menyebabkan orang yang lainnya itu (B) dapat bertindak atau tidak boleh bertindak sesuai dengan keinginan A (Budiharjo, 1983:9).

Konsekuensi logis dari kekuasaan itu adalah strategi menggunakan kekuasaan seseorang ke dalam peristiwa rapat dinas (PRD) melalui tindak direktif. Kekuasaan seorang pejabat dalam PRD akan berkorelasi dengan jabatan strukturalnya. Realisasi tindak direktif pejabat dalam PRD dipengaruhi pula oleh seberapa besar kekuasaan seorang pejabat tersebut dalam jabatan strukturalnya. Kategori TTD paling tinggi derajat kesantunannya, yaitu sub-TTD *menyilakan* pada kategori *to order* 'memerintah', dan sub-TTD *menawarkan* pada kategori TTD *to request* 'meminta' sampai dengan kategori TTD yang paling rendah derajat kesantunannya, yaitu sub-TTD *melarang* pada kategori TTD *to prohibit* 'melarang' merupakan cerminan atas kekuasaannya (Prayitno, 2009:100-200).

Rumusan skala kesantunan TTD di atas adalah realisasi dalam konteks pada umumnya. Tidak demikian halnya dengan pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta yang memiliki latar belakang budaya Jawa. Hasil penelitian (Prayitno, 2007:1-100) menunjukkan bahwa pejabat dalam PRD tidaklah menempatkan kekuasaan itu sebagai satu-satunya pertimbangan penentu realisasi dalam bertindak tutur direktif. Ada pertimbangan lain yaitu, ketika pusat kekuasaan itu memungkinkan seorang pejabat dapat bertindak tutur direktif sesuai dengan kekuasaannya itu, yaitu sopan santun. Perbedaan wujud realisasi TTD dan sub-TTD dengan kekuasaan tersebut disebabkan oleh antara lain bahwa seorang pejabat harus dapat bekerjasama dan dapat menyenangkan sehingga perlu menghindari pertentangan, bermakna positif, jelas maksudnya, dan memiliki nilai *kurmat* (Jawa: 'hormat'), nilai *andhap asor* (Jawa: 'rendah hati'), nilai *empanpapan* (Jawa: 'sadar tempat'), dan nilai *tepa slira* (Jawa: 'tenggang rasa') (Gunarwan, 1994, 1-17; 2003:1-20).

Ketika seorang pejabat mengedepankan unsur kerjasama itulah sebenarnya dia dalam bertindak tutur direktif memegang prinsip kerjasama (PKS). Ketika seorang pejabat

mengutamakan hal yang menyenangkan itulah dia sebenarnya berpijak pada prinsip sopan santun (PSS). Namun demikian, penting untuk dikemukakan bahwa studi tentang kesantunan bertutur masih belum mendapatkan tempat yang memadai (Cummings, 1999: 1-34; Gunarwan, 2006: 1-17; Nemeth, 2001: 1-24; Wijana, 2004:1-14). Manakala seorang pejabat berupaya menghindari pertentangan langsung itulah dia sebenarnya berpedoman pada prinsip ironi (PI) dalam peristiwa-peristiwa rapat dinas. Kaidah PI mengharuskan bertutur direktif santun tetapi yang ditutur-direktifkan tidak benar karena apa yang dimaksudkan adalah hal yang sebaliknya. Ketiga prinsip inilah yang dijadikan prinsip dasar untuk menganalisis realisasi TTD yang digunakan oleh pejabat dalam PRD. Ketiga prinsip berkomunikasi dalam tindak direktif itu, yakni PKS, PSS, dan PI dijadikan pijakan utama dalam kerja analisis pada temuan dan pembahasan hasil penelitian berikut.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang lebih menekankan pada proses dan makna (Sutopo, 2002:38; Lindolf, 1994:21). Strategi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah studi kasus berganda yang menyajikan realitas multiperspektif berdasarkan kekayaan teoretis, kronologis, dan struktur komparatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan kantor Pemkot Surakarta, yaitu di badan, dinas, cabang dinas, kantor kota, kantor kecamatan, maupun di kantor kelurahan.

Objek penelitian ini adalah bentuk formal dan wujud pragmatik TTD dalam konteks PKS, PSS, dan PI. Sumber data penelitian ini adalah keseluruhan individu yang menjadi pejabat, baik perempuan maupun laki-laki di lingkungan Pemkot Surakarta. Penentuan sumber data ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (Rubin, 1995:71) atau oleh Goetz Le Compte (dalam Sutopo, 2002:54) dinamakan sebagai *criterion based selection*.

Data utama penelitian ini berupa satuan lingual TTD dalam wacana pembuka, isi, dan penutup pada PRD. Peristiwanya berupa aktivitas pejabat pada saat memberikan sambutan, penyuluhan, pengarahan, dan petunjuk, serta menyampaikan informasi, pendapat, berdiskusi, atau berpidato yang di dalamnya terdapat PKS, PSS, dan PI.

Teknik penyediaan data (:pengumpulan data) utama dalam penelitian ini adalah teknik simak dengan dasar cakap dan lanjutannya simak bebas libat cakap, rekam, catat, dan pengamatan berpartisipasi atau pengamatan terlibat pasif. Teknik penyediaan data itu dilengkapi dengan teknik cakap dengan dasar teknik pancing dan lanjutannya semuka (Sudaryanto, 1993:21-40; Mahsun, 2005) dan teknik kerjasama dengan informan (Subroto, 1991:4) atau teknik *indepth interviewing* (Miles, 1992:142).

Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode padan, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa (Subroto, 1991:55). Dengan demikian, alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Lebih khusus, metode yang digunakan adalah pragmatik dengan alat penentu mitra wicara (Sudaryanto, 1993:13-15). Verhaar (2002:391) menamakannya sebagai teknik analisis ekstensional, yaitu makna secara pragmatik di mana makna ditentukan menurut hal-hal yang ekstralingual bergantung konteksnya. Dalam hal ini kerja pragmatik tidak menganalisis situasi dan konteks, tetapi situasi dan konteks tersebut harus dipertimbangkan di dalam menentukan maksud penutur. Analisis itu semua diperkuat dengan metode analisis padan intralingual maupun padan ekstralingual (Mahsun, 2005:112-115). Temuan realisasi bentuk-bentuk TTD dan perwujudan TTD dalam hubungannya dengan PKS, PSS, dan PI

tersebut kemudian dikuantifikasi, direrata, dipersentase, di-sort dengan menggunakan program *sort microsoft excel* dan *datasheet compare merge presentation graph*. Skala kelangsungan dan peringkat kesantunan bertutur direktif dianalisis dengan mempertimbangkan skala-skala kesantunan model Brown-Levinson (1987); model Blum-Kulka (1987); dan model Leech (1983: 194-199); model ironi (Grice, 1981); dan model kerukunan (Gunarwan, 2003, 2005).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Realisasi Bentuk TTD dalam Kaitannya dengan PKS

Argumen utama prinsip ini adalah sebaiknya suatu proposisi jangan dipercaya bila dasar kebenarannya sama sekali tidak ada (Russell dalam Leech, 1993:119). Argumen ini mendasarkan pada pandangan Grice (1981:76) bahwa tuturan direktif itu sudah barang tentu mencerminkan sudut pandang logika yang mengedepankan kebenaran dan oleh karenanya TTD ini akan mementingkan makna proposisi. Untuk itu, rumusan semesta tindakan bahasanya adalah bahwa PKS dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk semua masyarakat bahasa. Singkat kata, supaya realisasi TTD itu memenuhi tuntutan PKS maka harus dikemukakan dengan cara-cara yang efisien, rasional, jelas, transparan, penuh kerjasama semaksimal mungkin, memadai, dan memberikan informasi yang tepat.

Realisasi TTD dan sub-TTD dalam kaitannya dengan PKS yang dibahas pada bagian ini dipusatkan hanya pada tiga maksim. Ketiga maksim itu adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim cara. Sementara itu, karena maksim relevansi telah menjadi prinsip mandiri, yaitu prinsip relevansi maka kedudukan keilmuannya telah sejajar dengan PKS, PSS, dan PI. Oleh sebab itu, prinsip relevansi penting untuk dibahas ke dalam bagian tersendiri.

Sub-submaksim yang digunakan sebagai dasar oleh *Pn* untuk menyatakan TTD dalam

kaitannya dengan PKS dapat dikemukakan sebagai berikut. Submaksim kejelasan direktif dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyatakan TTD maksim kuantitas. Submaksim kebenaran direktif dan kecukupan bukti dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyatakan TTD maksim kualitas. Submaksim ketepatan, ketidaktaksan, ringkas, dan keruntutan dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyatakan TTD maksim kualitas.

Realisasi TTD dan sub-TTD yang memenuhi maksim kuantitas di dalam penelitian ini didasarkan pada kejelasan direktif yang dituju. Realisasi sub-TTD yang dikemukakan secara jelas adalah mengandung maksud *perintah* dan *suruhan* pada kategori TTD *to order* 'memerintah'; maksud *permintaan*, *harapan*, *permohonan* pada kategori TTD *to request* 'meminta'; maksud *ajakan* pada kategori TTD *to invite* 'mengajak'; maksud *saran* dan *peringatan* pada kategori TTD *to advice* 'mengajak'; dan maksud *larangan* pada kategori TTD *to prohibit* 'melarang'.

Realisasi TTD dan sub-TTD yang memenuhi maksim kualitas di dalam penelitian ini didasarkan pada dua submaksim. Kedua submaksim itu adalah submaksim kebenaran direktif dan submaksim kecukupan bukti. Realisasi sub-TTD yang dikemukakan secara benar adalah berujud *dukungan* dan *harapan*. Sementara itu, realisasi TTD yang dikemukakan dengan bukti kuat adalah *nasihat*, *peringatan*, *perintah*, *suruhan*, dan *target*.

Selanjutnya, realisasi TTD maksim cara di dalam penelitian ini didasarkan atas empat hal, yaitu: submaksim ketepatan, submaksim ketidaktaksan, submaksim ringkas, dan submaksim keruntutan. Hasilnya adalah wujud TTD yang dikemukakan secara tepat tampak pada realisasi TTD yang mengandung maksud *ajakan*, *imbau*, *nasihat*, *permintaan*, *perintah*, *permohonan*, *saran*, *persilakan*, dan *teguran*. Realisasi TTD yang dikemukakan dengan tidak taksa seperti pada maksud *ancaman* dan *harapan*. Wujud TTD yang

dikemukakan secara singkat tampak pada realisasi TTD yang berupa *harapan*, *imbau*, *larangan*, *permintaan*, *persilakan*, *nasihat*, *perintah*, *permohonan*, *suruhan*. Sementara itu, realisasi TTD yang dikemukakan secara runtut tampak pada TTD yang berupa *desakan*, *harapan*, *nasihat*, *perintah*, dan *permohonan*.

Realisasi TTD dalam PRD dalam hubungannya dengan pemenuhan PKS diilustrasikan melalui Tabel 1. Berdasarkan tabel 1 berikut tampak bahwa sub-TTD *memerintah*, *menyuruh*, *mengharap*, *mengingatkan* memiliki kelincuhan berinteraksi dalam maksim kuantitas, kualitas, dan cara. Tidak demikian halnya dengan sub-TTD *mendesak*, *mengancam* hanya beroperasi dalam submaksim ketidaktaksan dan keruntutan strategi pada maksim cara.

3.2 Realisasi Bentuk TTD dalam Kaitannya dengan PSS

Pijakan utama analisis ini adalah mengapa pada tingkat lokal dan budaya tertentu suatu masyarakat dalam bertutur direktif memilih menggunakan cara-cara yang tidak langsung dan tidak literal. Tidak terkecuali, khususnya pejabat Pemkot Surakarta sebagai bagian dari masyarakat Jawa yang lebih dikenal halus, santun, dan lembut tutur katanya. Tutur kata yang halus, santun, dan lembut ini -bahkan memutar atau melingkar (*circular*) dan simbolik atau *indirect*, oleh pejabat direalisasikan dengan berbagai bentuk tuturan direktif dalam rapat peristiwa dinas.

Brown dan Levinson (1992:129-207) menyatakan supaya pilihan bentuk TTD itu dapat memenuhi kaidah PSS dapat dinyatakan dengan cara-cara yang: (1) tak langsung, (2) memakai pagar, (3) menunjukkan pesimisme, (4) meminimalkan paksaan, (5) memberikan penghormatan, (6) meminta maaf, (7) menggunakan impersonal, (8) bersifat umum, dan (9) *nominalize*, dan (10) tidak mencampuri mitra tutur.

**Tabel 1 Realisasi TTD dalam PRD
Berdasarkan Pematuhan terhadap Maksim-maksim PKS**

No	Maksim	Submaksim	Realisasi TTD				
			Wujud TTD	Ket Data*)			
1	kuantitas	kejelasan direktif (keinformatifan direktif)	harapan	nPP 5-6/9			
			permohonan	nPP 1-4/53			
			saran	nPP 1-8/64			
			ajakan	nPL 10-1/2			
			harapan	nPL 10-2/22			
			larangan	nPL 14-2/31			
			peringatan	nPL 12-3/46			
			perintah	nPL 9-8/69			
			permintaan	nPL 14-5/5			
			permohonan	nPL 14-5/88			
2	kualitas	kebenaran direktif	dukungan	nPP 1-6/6			
			harapan	nPP 1-3/10			
			harapan	nPL 10-2/19			
		kecukupan bukti	nasihat	nPP 6-3/32			
			peringatan	nPP 3-3/38			
			perintah	nPL 10-2/59			
			suruhan	nPL 14-2/108			
			target	nPL 10-11/113			
			3	cara	ketepatan direktif	ajakan	nPP 5-10/1
						nasihat	nPP 1-6/27
permintaan	nPP 5-3/47						
silakan	nPP 1-6/69						
imbauhan	nPL 14-2/25						
peringatan	nPL 10-5/47						
perintah	nPL 12-2/80						
saran	nPL 12-2/92						
silakan	nPL 12-2/101						
teguran	nPL 10-8/114						
3	cara	ketidaktaksaan (ketidakambiguitasan)	ancaman	nPL 12-1/7			
			harapan	nPL 10-5/21			
			harapan	nPP 6-2/14			
			imbauhan	nPP 1-8/16			
			penyerahan	nPP 5-2/25			
			nasihat	nPP 1-6/34			
			perintah	nPP 7-3/41			
			permohonan	nPP 5-1/55			
			suruhan	nPP 5-12/80			
			harapan	nPL 10-4/20			
3	cara	ringkas, singkat, padat	larangan	nPL 12-2/30			
			perintah	nPL 10-8/75			
			permintaan	nPL 10-6/84			
			silakan	nPL 10-5/98			
			suruhan	nPL 11-5/103			
			keruntutan strategi direktif	harapan	nPP 7-4/15		
				permohonan	nPP 6-4/24		
				desakan	nPL 10-4/14		
				nasihat	nPL 12-2/40		
			keruntutan strategi direktif	perintah	nPL 10-3/62		

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1/x_2 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

Landasan yang digunakan untuk menerjemahkan TTD yang bermodus tak langsung dalam penelitian ini adalah semakin suatu tindak direktif tak langsung maka tuturan direktif itu semakin santun. Namun demikian, tidak demikian pada TTD yang bermodus berpagar. Kenyataan ini hanya berlaku jika pejabat bertindak tutur direktif dengan atasan. Sebab jika modus berpagar ini digunakan kepada bawahan maka justru menjadi tidak santun.

Modifikasi PSS tentang kaidah realisasi TTD supaya dapat memenuhi kesantunan telah dikemukakan oleh Blum-Kulka (1987:101-125). Menurut Blum-Kulka, derajat PSS dapat dinyatakan dengan menggunakan berbagai modus, sejak dari tuturan direktif yang: (1) bermodus imperatif, (2) berformatif eksplisit, (3) berformatif berpagar, (4) berpernyataan atau berproposisi keharusan, (5) berpernyataan keinginan, (6) berpernyataan saran, (7) berpernyataan pertanyaan, (8) berisyarat kuat, (9) berisyarat halus, dan sampai dengan yang menggunakan, (10) berpernyataan kelakar (*jokes*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi TTD dalam kaitannya dengan PSS yang frekuensi kemunculannya paling tinggi dalam PRD adalah TTD tak langsung yang digunakan oleh pejabat dalam PRD dapat mengandung maksud *ajakan, arahan, amarah, ancaman, arahan, bujukan, desakan, dorongan, imbauan, instruksi, kecaman, keharusan, larangan, nasihat, paksaan, penyerahan, peringatan, perintah, permintaan, permohonan, pinjaman, rayuan, saran, seruan, silakan, suruhan, tagihan, tantangan, teguran, tuntutan, dan umpatan*.

Frekuensi berikutnya adalah TTD yang dikemukakan dengan cara berpagar. Realisasi TTD yang dikemukakan dengan cara berpagar ini berupa TTD *ajakan, ancaman, anjuran, imbauan, larangan, pencegahan, peringatan, perintah, sindiran, dan umpatan*. Disusul kemudian cara pengungkapan TTD yang bersifat umum. Realisasi TTD yang bersifat umum yang digunakan oleh pejabat dalam

PRD ini mengandung maksud *anjuran, dorongan, imbauan, nasihat, peringatan, perintah, dan seruan*.

Sementara itu, realisasi kesantunan yang dikemukakan dengan cara pesimisme, penghormatan, meminimalkan paksaan, dan cara impersonal meskipun digunakan oleh pejabat dalam PRD tetapi kemunculannya tidak begitu dominan. Ungkapan pesimisme untuk memenuhi kaidah kesantunan direalisasikan oleh pejabat dalam bentuk subTTD *nasihat, pencegahan, permohonan, dan suruhan*. Ungkapan penghormatan untuk mencapai kesantunan direalisasikan oleh pejabat dalam bentuk sub-TTD *arahan, permohonan, dan rayuan*.

Realisasi TTD yang digunakan oleh pejabat dalam PRD dianalisis kepatuhannya menurut teori PSS Brown-Levinson ditampilkan melalui sajian Tabel 2.

Sementara itu, jika realisasi kesantunan TTD pejabat dalam peristiwa rapat dinas dikaji kepatuhannya menurut PSS teori Blum-Kulka menunjukkan bahwa modus imperatif yang bertujuan untuk *memerintah* cenderung bersifat kompetitif dan konfliktif. Modus pemakaian TTD secara eksplisit yang bertujuan *melarang*, dan *meminta* menunjukkan kesantunan yang kurang menguntungkan bawahan, kurang mengindahkan citra diri bawahan, dan bahkan menunjukkan terdapatnya dominasi peran atasan-bawahan.

Realisasi TTD yang bermodus performatif berpagar untuk tujuan *marah, mengimbau, menyilakan, menyuruh, dan menagih* menunjukkan kesantunan menghargai citra diri bawahan, adanya inferensi panjang, meminimalkan paksaan, dan menciptakan hubungan harmoni. Selanjutnya, jika realisasi TTD bermodus pernyataan keharusan bertujuan *mengajak* dan *mengharuskan* cenderung berkesantunan kompetitif, konfliktif, dan memaksa mitra tuturnya.

Realisasi TTD bermodus pernyataan keinginan bertujuan untuk *mengarahkan, meminta* berkesantunan untuk menjaga

Tabel 2. Realisasi Kesantunan TTD dalam Peristiwa Rapat Dinas Berdasarkan Teori PSS Brown & Levinson

No	Modus TTD	Realisasi Maksud TTD dan Sumber Data			
1.	Tak langsung	perintah	nPP 7-6/43	saran	nPP 5-4/65
		perintah	nPL 9-4/64	seruan	nPP 3-2/68
		suruhan suruhan	nPP 2-4/71	amarah	nPL 10-4/6
		instruksi	nPL 9-6/105	ancaman	nPL 10-5/8
		paksaan	nPL 12-2/26	desakan	nPL 12-2/15
		keharusan	nPL 10-6/42	dorongan	nPL 11-8/17
		pinjam silakan	nPL 10-9/29	kecaman	nPL 10-10/27
		silakan	nPP 3-1/59	penyerahan	nPL 10-8/45
		permintaan	nPL 11-1/99	peringatan	nPL 10-5/48
		permohonan	nPP 5-15/70	seruan	nPL 1—3/96
		ajakan	nPP 1-6/45	tagihan	nPL 14-2/110
		bujukan	nPP 1-6/51	tantangan	nPL 12-2/112
		rayuan	nPL 14-2/1	teguran	nPL 9-8/115
		nasihat	nPL 11-3/12	teguran	nPP 1-6/85
		arahan	nPP 4-1/60	tuntutan	nPL 10-8/117
		imbauan	nPP 1-8/28	umpatan	nPL 10-8/122
peringatan	nPP 3-5/3	larangan	nPP 3-5/20		
	nPP 5-17/19 nPP 3-3/36	pencegahan	nPP 1-6/35		
2.	Berpagar	perintah	nPL 10-3/71	sindiran	nPL 12-2/102
		ajakan	nPL 10-11/5	umpatan	nPL 10-8/125
		imbauan	nPP 3-2/17	ancaman	nPL 10-3/9
		anjuran	nPL 12-2/11	larangan	nPL 10-5/33
		peringatan	nPL 10-2/51	pencegahan	nPL 14-3/44
3.	Pesimisme	suruhan	nPP 1-5/73	nasihat	nPP 1-5/30
		permohonan	nPP 4-7/57	pencegahan	nPL 9-2/43
		rayuan	nPP 3-2/62		
4.	Meminimalkan Paksanaan	nasihat	nPP 1-5/26	saran	nPL 8-3/91
		nasihat	nPL 12-3/39		
5.	Penghormatan	permohonan	nPP 3-2/54	rayuan	nPL 11-12/90
		permohonan	nPL 10-2/89	arahan	nPP 5-16/4
6.	Meminta maaf	-	-		
7.	Impersonal	imbauan	nPP 5-17/18	tantangan	nPL 11-7/111
		nasihat	nPL 14-5/5		
8.	Bersifat Umum	perintah	nPL 12-1/78	imbauan	nPL 12-2/23
		dorongan	nPL 12-1/95	seruan	nPL 12-1/9
		nasihat	nPL 12-1/37	peringatan	nPL 14-2/53
		anjuran	nPL 8-1/10		

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1/x_2 x_1 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

kehormatan *Mt*, mengurangi konfrontasi dengan *Mt*, dan menyediakan alternatif tindakan bagi *Mt*. Jika modusnya pernyataan-pertanyaan, realisasi TTD-nya adalah *mengajak, menganjurkan, memaksa, mencegah, meminta, mengingatkan, meminjam, merayu, menyarankan, menyuruh, merayu, menantang, dan menegur*. Kaitan modus TTD dengan maksud yang dituju tersebut menunjukkan upaya untuk mengurangi derajat kelangsungan ber-TTD dan adanya maksud asimetris dengan modusnya.

Realisasi TTD bermodus isyarat kuat yang bertujuan untuk *memarahi, mencegah, mengancam, membujuk, mendesak, menginstruksikan, mencegah, mengingatkan, meminta, memohon, merayu, menyarankan, menyerukan, menegur, menuntut, mengumpat* berkecenderungan tak langsung, maksud bersyarat, memerlukan inferensi yang panjang, dan perlu menghubungkannya dengan

isyarat kuat yang menyertainya.

Realisasi TTD yang bermodus isyarat halus bertujuan antara lain untuk *mengarahkan, mendorong, mengimbau, melarang, menasihati, mencegah, memohon, mengingatkan, memerintah, meminta, merayu, menyarankan, menyerukan, dan menyilakan*. Realisasi TTD dengan isyarat halus ini dalam PRD memiliki kesantunan paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh maksud yang hendak dituju dikemukakan secara samar-samar. Oleh sebab itu, dalam modus isyarat halus ini maksud yang dikehendaki sama sekali tidak disebutkan. Cara ini dilakukan oleh *Pn* untuk mencapai derajat harmoni dalam menduduki jabatan strukturalnya.

Sejumlah modus pemakaian TTD dalam PRD menurut teori kesantunan Blum-Kulka tersebut jika diilustrasikan ke dalam tabel akan tampak pada Tabel 3.a, Tabel 3.b, dan Tabel 3.c berikut.

Tabel 3.a Realisasi Kesantunan TTD dalam PRD
Berdasarkan *Modus Imperatif dan Performatif* Teori PSS Blum-Kulka

No	Modus TTD	Probabilitas Realisasi TTD		Kesantunan
			Realisasi TTD	
1.	bermodus imperatif	perintah	[nPP7-6/43]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perintah langsung ▪ inferensi langsung ▪ perintah tegas ▪ kompetitif dan konfliktif ▪ kurang menguntungkan bawahan ▪ kurang mengindahkan citra diri bawahan ▪ dominasi peran pejabat atas bawahan ▪ menghargai citra diri bawahan ▪ inferensi panjang ▪ meminimalkan paksaan ▪ menciptakan hubungan harmonis
		perintah	[nPL 9-8/69] [nPL 10-8/74]	
2.	performatif eksplisit	tantangan	[nPL 10-8/75] [nPL 12-1/79]	
		larangan	[nPL 11-7/111] [nPL 14-2/31]	
		permintaan	[nPL 12-2/30] [nPL 14-2/35]	
			[nPL 12-1/34] [nPL 14-2/35]	
3.	performatif berpagar	permintaan	[nPL 10-4/36] [nPL 14-5/88]	
		imbauan	[nPL 10-8/86] [nPL 14-5/88]	
		amarah	[nPP 3-2/17]	
		silakan	[nPL 10-11/5]	
		tagihan	[nPL 14-2/100]	
		suruhan	[nPL 9-6/105]	
		tagihan	[nPL 14-2/110]	

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1/x_2 x_1 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

Realisasi sub-TTD dalam kaitannya dengan kesantunan TTD Blum-Kulka yang bermodus imperatif sebagaimana diilustrasikan melalui Tabel 3.a tersebut dominan berujud sub-TTD *memerintah*. Modus TTD tersebut memiliki kesantunan yang cenderung kompetitif dan konfliktif. Modus verba performatif eksplisit digunakan untuk menyatakan sub-TTD *melarang*. Watak modus TTD tersebut adalah kurang mengindahkan citra diri bawahan dan menunjukkan adanya dominasi peran atau status pejabat atas bawahannya. Dengan demikian, modus kedua TTD tersebut dalam

konteks budaya pemerintahan yang berbudaya Jawa cenderung kurang santun.

Modus TTD yang dikemukakan dengan performatif berpagar dipandang lebih santun daripada modus imperatif dan modus performatif eksplisit. Hal itu disebabkan dalam modus TTD performatif berpagar terdapat upaya pejabat untuk menghargai citra diri bawahan, memerlukan inferensi panjang untuk mencapai maksud yang dituju, terdapat upaya meminimalkan paksaan pejabat terhadap bawahan, dan terdapat upaya menciptakan hubungan harmonis di antara pejabat-bawahan.

Tabel 3.b Realisasi Kesantunan TTD dalam PRD Berdasarkan *Pernyataan* Teori PSS Blum-Kulka

No	Probabilitas Realisasi TTD			Kesantunan
	Modus TTD		Realisasi TTD	
1.	pernyataan keharusan	ajakan	[nPL 14-2/1]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kompetitif ▪ konfliktif ▪ memaksa ▪ menjaga kehormatan ▪ mengurangi konfrontasi ▪ menyediakan alternatif tindakan bagi <i>Mt</i> ▪ pemecahan masalah <i>Mt</i> ▪ seandainya... ▪ sebaiknya... ▪ mengurangi derajat kelangsungan ▪ maksud asimetris dengan modus
		keharusan	[nPL 10-9/29]	
2.	pernyataan keinginan	arahan	[nPP 5-16/4]	
		permintaan	[nPP 5-18/50]	
		permintaan	[nPL 10-6/84]	
3.	rumusan saran	saran	[nPP 5-11/63]	
		saran	[nPL 12-2/92] [nPL 14-5/93]	
4.	pernyataan-pertanyaan	pengecahan	[nPP 1-6/21]	
		peringatan	[nPP 3-3/36]	
		permintaan	[nPP 7-5/37]	
		pinjam	[nPP 3-1/59]	
		rayuan	[nPP 4-1/61]	
		saran	[nPP 5-4/65]	
		suruhan	[nPP 2-4/71] [nPP 7-2/72]	
			[nPP 2-2/75] [nPP 2-3/76]	
			[nPP 2-6/77] [nPP 2-8/78]	
		ajakan	[nPL 12-2/4]	
		anjuran	[nPL 12-2/11]	
		paksaan	[nPL 10-6/42]	
		peringatan	[nPL 10-5/48]	
		rayuan	[nPL 11-2/90]	
		suruhan	[nPL 10-2/107]	
tantangan	[nPL 12-2/112]			
teguran	[nPL 12-1-116]			

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1/x_2 x_1 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

Derajat kesantunan modus TTD yang dikemukakan dengan pernyataan keharusan seperti tampak pada ilustrasi Tabel 3.b tersebut simetris dengan fungsi sosial kompetitif, konflikatif, dan paksaan terhadap mitra tutur.

Tabel 3.c Realisasi Kesantunan TTD dalam Peristiwa Rapat Dinas Berdasarkan *Isyarat Kuat dan Halus* Teori PSS Blum-Kulka

No	Probabilitas Realisasi TTD		Kesantunan	
	Modus TTD	Realisasi TTD		
1.	isyarat kuat	pencegahan	[nPP 1-6/35]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maksud tak langsung ▪ maksud bersyarat ▪ memerlukan inferensi yang panjang ▪ menghubungkannya isyarat ▪ akomodatif ▪ koordinatif
		peringatan	[nPP 3-3/39]	
		permintaan	[nPP 3-2/46]	
		mohon	[nPP 3-2/58]	
		rayuan	[nPP 3-2/62]	
		saran	[nPP 6-2/66]	
		seruan	[nPP 3-2/68]	
		teguran	[nPP 1-6/85]	
		amarah	[nPL 10-4/6]	
		ancaman	[nPL 10-5/8]	
		bujukan	[nPL 11-6/13]	
		desakan	[nPL 12-2/15]	
		instruksi	[nPL 12-2/26]	
		kecaman	[nPL 10-8-28]	
		peringatan	[nPL 10-5/48]	
		perintah	[nPL 10-2/50]	
		seruan	[nPL 10-3/96]	
tuntutan	[nPL 10-5/118]			
umpatan	[nPL 10-8/122]			
2.	isyarat halus	arahan	[nPP 3-5/3]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ samar-samar maksudnya (tidak tembus pandang) ▪ maksud sama sekali tidak disebutkan ▪ harmoni
		imbauan	[nPP 5-17/19]	
		pencegahan	[nPP 1-6/22]	
		permohonan	[nPP	
		nasihat	[nPP 1-5/26]	
		peringatan	[nPP 3-3/30]	
		permintaan	[nPP 1-6/51]	
		silakan	[nPP 5-15/70]	
		dorongan	[nPL 11-8/17]	
		imbauan	[nPL 12-2/24]	
		larangan	[nPL 10-5/32]	
		nasihat	[nPL 14-5/38]	
		pencegahan	[nPL 9-2/43]	
		peringatan	[nPL 10-1/54]	
		perintah	[nPL 9-5-65]	
		permohonan	[nPL 10-2/89]	
		rayuan	[nPL 11-2/90]	
saran	[nPL 14-5/93]			
seruan	[nPL 12-1/97]			
silakan	[nPL 11-1/99]			

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 $x_1 - y_1 / x_2$ x_1 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

Realisasi TTD yang dinyatakan dengan modus pernyataan keharusan kurang santun daripada dikemukakan dengan modus pernyataan keinginan dan saran, apalagi dengan modus pernyataan pertanyaan. Hal demikian disebabkan dalam modus TTD pernyataan keinginan dan saran berupa usulan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang telah dilakukan oleh *Mt* menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan ilustrasi realisasi kesantunan TTD dalam PRD menurut PSS Blum-Kulka pada tabel 1-3 di atas, tampak bahwa TTD dalam PRD yang: (a) bermodus imperatif cenderung bersifat kompetitif dan konfliktif karena pejabat hanya mementingkan kesesuaian peran dan statusnya dalam peristiwa rapat dinas; (b) bermodus performatif eksplisit digunakan oleh pejabat sesuai dengan tingkat kewenangan yang diembannya. Jadi, tuturan direktif modus ini digunakan oleh pejabat hanya kepada bawahan, bukan sebaliknya, bawahan kepada atasannya. Tuturan direktif modus ini, seperti halnya dinyatakan Ibrahim (1996:92) cenderung bertujuan untuk menempatkan dan menunjukkan kewenangan formal pejabat berdasarkan peran dan statusnya dalam peristiwa rapat dinas. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun bagi bawahan untuk menolak atau tidak melakukannya.

Selanjutnya, tuturan direktif yang bermodus performatif berpagar cenderung dimaksudkan sebagai tuturan tak langsung. Peserta rapat membutuhkan inferensi yang panjang dari apa yang dimaksudkan oleh pejabat melalui rapat dinas itu. Strategi ini dipilih supaya tindak direktif yang dimaksudkannya dapat menciptakan hubungan harmonis di antara atasan-bawahan. Sementara itu, tindak tutur direktif yang bermodus keharusan, seperti halnya yang bermodus imperatif, cenderung bersifat kompetitif sehingga berkecenderungan menimbulkan konflik. Tuturan direktif modus ini sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada bawahan-atasan untuk menolak atau memilih alternatif tindakan lain

selain yang diharuskan itu.

Tidak demikian halnya dengan tindak tutur direktif yang bermodus keinginan. Tindak tutur ini cenderung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan pejabat atas status sosialnya. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi konfrontasi terbuka dengan bawahannya. Oleh sebab itu, meskipun seorang pejabat sangat memungkinkan untuk menggunakan tindak tutur direktif yang dapat memaksa bawahan tetapi karena untuk menjaga kehormatannya maka TTD yang demikian itu tidak dilakukannya. Demikian halnya dengan tuturan direktif bermodus dengan rumusan saran dapat memberikan kebebasan berpikir kepada bawahan-atasan. Strategi ini cenderung tidak dimaksudkan untuk memaksakan kehendak sebab TTD tersebut berusaha memberikan saran terbaik sekaligus memberikan masukan pemecahan masalah kepada bawahan-atasan.

TTD dalam PRD yang lain adalah tuturan direktif yang bermodus pertanyaan. Tuturan direktif jenis ini adalah tuturan direktif yang tidak langsung. Maksud direktif sesuai dengan sub-sub direktifnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Strategi ini dipilih oleh pejabat untuk mengurangi derajat kelangsungan maksud tuturan. Sementara itu, tuturan direktif yang bermodus isyarat kuat cenderung tidak langsung. Bawahan-atasan dalam rapat dinas memerlukan waktu untuk menangkap maksud direktif yang dikehendaki oleh pejabat. Maksud direktif dalam strategi ini baru dapat ditangkap oleh bawahan dan atau atasan setelah mereka dapat menghubungkannya dengan isyarat yang digunakan oleh pejabat. Terakhir, tuturan direktif dalam peristiwa rapat dinas yang bermodus isyarat halus. Tuturan direktif ini pada dasarnya sangat tidak langsung. Tuturan ini tidak jelas maksud dan sasarannya. Untuk itu, diperlukan kemampuan memahami konteks situasi tutur yang mengiringi perwujudan realisasi tindak tutur direktif itu.

Kajian realisasi TTD dalam perspektif

Tabel 4. Realisasi Tindak Tutur Direktif Pejabat dalam Peristiwa Rapat Dinas Berdasarkan Teori PSS Leech

No	Skala Kesantunan Pragmatik TTD	Realisasi Tindak Direktif	Kesantunan
1.	skala biaya-keuntungan	perintah [nPP 7-6/43] permintaan [nPP 3-2/46] pinjam [nPP 3-1/59] suruhan [nPP -24/71] teguran [nPP 1-6/85] ajakan [nPL 12-2/4] amarah [nPL 10-4/6] ancaman [nPL 12-1/7] dorongan [nPL 11-8/17] kecaman [nPL 10-10/27] perintah [nPL 9-4/64] tantangan [nPL 10-8/117] tuntutan [nPL 10-5/121] umpatan [nPL 10-8/122]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ biaya dan keuntungan untuk melakukan tindakan dalam kaitannya dengan <i>Pn</i> dan <i>Mt</i>. ▪ semakin menguntungkan <i>Mt</i> semakin santun.
2.	skala keopsionalan	arahan [nPP 5-16/4] imbau [nPP 3-2/17] pencegahan [nPP 1-6/21] nasihat [nPP 1-5/26] pencegahan [nPP 1-6/35] peringatan [nPP 7-5/37] permohonan [nPP 1-6/51] rayuan [nPP 4-1/61] saran [nPP 5-4/65] seruan [nPP 3-2/68] silakan [nPP 5-15/70] keharusan [nPL 14-2/1] anjuran [nPL 8-1/10] imbau [nPL 14-3/24] instruksi [nPL 12-2/26] larangan [nPL 10-5/32] nasihat [nPL 12-1/37] paksaan [nPL 10-6/42] pencegahan [nPL 9-2/43] peringatan [nPL 10-5/48] permohonan [nPL 10-2/89] rayuan [nPL 11-2/90] saran [nPL 8-3/91] seruan [nPL 10-3/96] silakan [nPL 11-1/99] suruhan [nPL 9-6/105]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pilihan dalam melakukan tindakan; semakin besar jumlah pilihan bagi <i>Mt</i> semakin santun tindak direktifnya. ▪ tuturan direktif semakin bawah semakin banyak pilihan sehingga semakin santun.
3.	skala ketaklangsungan	peringatan [nPP 3-3/36] suruhan [nPP 7-2/72] harapan [nPL 10-2/19] suruhan [nPL 2-7/83]	semakin tak langsung semakin santun

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1/x_2 x_1 menunjukkan peristiwa rapat dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

teori kesantunan Leech didekati dengan tiga skala pragmatik. Ketiga skala pragmatik itu adalah skala biaya-keuntungan, skala keopsionalan, dan skala ketidaklangsungan. Hasilnya adalah, realisasi TTD yang memenuhi kaidah skala biaya kelangsungan bertujuan untuk *mengajak, mengancam, mendorong, mengecam, memerintah, meminjam, menyuruh, menantang, menegur, menuntut, dan mengumpat*. Realisasi TTD dalam perspektif skala ini menggambarkan bahwa semakin sebuah TTD dapat memberikan keuntungan kepada *Mt* maka TTD tersebut semakin santun atau sebaliknya.

Realisasi kesantunan TTD yang memenuhi ketiga kaidah Leech, yaitu skala biaya keuntungan, skala keopsionalan, dan skala ketidaklangsungan ditampilkan melalui Tabel 4.

Realisasi TTD yang memenuhi kaidah skala keopsionalan bertujuan untuk sub-TTD *mengintruksikan, menyilakan* (kategori TTD *to order* 'memerintah'); sub-TTD *memohon*

(kategori TTD *to request* 'meminta'); sub-TTD *menasihati, menganjurkan, menyarankan, mengarahkan, mengimbau, menyerukan* (kategori TTD *to advice* 'memberi nasihat'); sub-TTD *merayu* (kategori TTD *to invite* 'mengajak'); dan sub-TTD *mencegah* (kategori TTD *to prohibit* 'melarang'). Realisasi TTD yang memenuhi kaidah ketidaklangsungan adalah untuk sub-TTD *mengharap* (kategori TTD *to request* 'meminta'); *menyuruh* (kategori TTD *to order* 'memerintah'); dan *mengingatikan* (kategori TTD *to advice* 'memberi nasihat').

c. Realisasi Bentuk TTD dalam Kaitannya dengan PI

Realisasi TTD dan sub-TTD pada PRD dalam hubungannya dengan penggunaan strategi PI diilustrasikan menurut struktur luar dan implikatur kesantunan dengan kaidah PI Leech. Hasilnya seperti tampak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Realisasi TTD dalam PRD Berdasarkan Struktur Luar dan Implikatur Kesantunan PI Leech

No	Realisasi TTD	Struktur Luar TTD	Implikatur Kesantunan	Ket Data
1.	saran	Vp implisit	pernyataan yang berlebihan	[nPL 10-3]/[94]
2.	ajakan	intonasi tanya	pernyataan yang mengecilkan (pengecilan arti)	[nPL 12-2]/[4]
3.	imbauan	intonasi tanya	ketidaktulusan	[nPL 14-2]/[25]
4.	seruan	pengulangan	ketidaksabaran	[nPL 10-3]/[96]
5.	pengecahan	verba performatif bahasa jawa	pernyataan menggelikan	[nPL 14-3]/[44]
6.	desakan	intonasi seru	menyinggung perasaan (sarkatis)	[nPL 12-2] [15]
7.	perintah	campur kode	cemooh halus	[nPL 14-3]/[82]

*) nPP, nPL menunjukkan jenis kelamin pejabat
 x_1 - y_1 / x_2 x_1 menunjukkan peristiwa dinas, y_1 menunjukkan wacana rapat dinas, x_2 nomor korpus data.

Berdasarkan sajian di atas, tampak bahwa PI mengambil tempat di antara PKS dan PSS. Oleh sebab itu, Leech (1993: 224) mengatakannya bahwa PI menjadi parasit bagi PKS dan PSS. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa jika kefungsionalan PKS dan PSS langsung tampak pada peranan *Pn* dan *Mt* dalam mengemban komonikasi interpersonal yang efektif. Sementara itu, PI lebih disfungsi-onal. Jika PSS mendorong terwujudnya hubungan yang ramah dan menghindari konflik di antara pejabat dengan atasan-bawahan dalam peristiwa rapat dinas. Sementara itu, tindak tutur direktif yang ironis adalah jika menggunakan sopan-santun yang tidak tulus sebagai pengganti tindak tutur yang tidak sopan. Jadi, sesungguhnya tindak tutur direktif yang ironis hakikatnya bertujuan untuk merugikan dan atau menyudutkan bawahan-atasan dalam peristiwa rapat dinas. Dengan demikian, tuturan direktif yang direalisasikan melalui PI tampak seakan-akan sopan meskipun sesungguhnya atau sejatinya tidak sopan.

4. Simpulan

1. Maksim-maksim PKS yang dikembangkan oleh pejabat belatar belakang budaya Jawa ditampakkan melalui sub-submaksim kejelasan direktif, kebenaran direktif, kecukupan bukti, ketepatan direktif, ketidaktaksan direktif, keruntutan strategi direktif. Realisasi submaksim itu menunjukkan bahwa pejabat yang berlatar belakang budaya Jawa tetap berpijak pada norma kuantitas, kualitas, dan relevansi.

2. Pejabat di lingkungan Pemkot berbudaya Jawa cenderung menggunakan cara-cara kesantunan tak langsung, berpagar, dan pesimisme daripada dengan cara-cara meminimalkan paksaan, penghormatan, meminta maaf, dan impersonal.
3. Pernyataan yang digunakan oleh pejabat di lingkungan pemkot berbudaya Jawa lebih direalisasikan melalui modus pernyataan-pertanyaan daripada melalui modus rumusan saran.
4. Isyarat halus bertutur direktif pejabat di lingkungan pemkot berbudaya Jawa lebih dominan ditonjolkan daripada melalui cara-cara isyarat kuat.
5. Strategi PI yang dikembangkan oleh pejabat di lingkungan pemkot berbudaya Jawa lebih banyak mengambil tempat di antara PKS dan PSS sehingga menjadi parasit bagi PKS dan PSS, misalnya: untuk ketidaktulusan, ketidaksabaran, pernyataan menggelikan, pernyataan mengecilkan, maupun bentuk cemooh halus. Konsekuensinya, tuturan direktif yang direalisasikan melalui PI tersebut tampak seakan-akan sopan meskipun sesungguhnya atau sejatinya tidak sopan.

5. Terima Kasih

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Dikti Depdiknas yang telah menjadi sponsor utama penelitian ini; Prof. Dr. Edi Subroto dan Prof. Dr. Soepomo Poedjoesoedarmo yang telah memberikan masukan terhadap artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, E Aminudin. 2007. "Tiga Dimensi Kesantunan Berbahasa: Tinjauan Terkini" dalam *Kongres Linguistik Nasional XII*, Surakarta, 3-6 September 2007.
- Blum-Kulka, Shoshana. 1987. "Indirectness and Politeness in Requests: Some or Different?" in *Journal of Pragmatics*, Volume 11, p 131-146.

- Brown, Penelope and Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiharjo, Meriam. 1983. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Cummings, Louise. 1999. *Pragmatics, A Multidisciplinary Perspective* (Terj.). New York: Oxford University Press Inc.
- Grice, H. Paul. 1981. "Presupposition and Conversational Implicature" dalam *Radical Pragmatics*. New York: Academic Press.
- Gunarwan, Asim. 1994. "Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik" dalam *PELLBA 7*. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atmajaya.
- Gunarwan, Asim. 2003. "Persepsi Nilai Budaya Jawa di Kalangan Orang Jawa: Implikasi dan Penggunaan" dalam *PELLBA 16*. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atmajaya.
- Gunarwan, Asim. 2006. "The Speech Act of Criticizing among Native Speakers of Javanese". Makalah pada *Firth International Meeting of The South East Asian Linguistic Society*. Oregon, 9-12 Mei 2006.
- Leech, Geoffrey N. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Lindolf, Thomas R. 1994. *Qualitative Communication Research Methods*. Thousand Oaks; Saga Publications.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B. and Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Course Book of New Method*. Beverly Hills: Saga Publications.
- Nemeth, Eniko T. 2001. *Pragmatics in 2001: Selected Papers from The 7th International Pragmatics Conference*. Belgium: International Pragmatics Association.
- Prayitno, Harun Joko. 2004. "Perilaku Tindak Tutur Ilokusi Pejabat dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik dengan Pendekatan Gender" (*Laporan Program Penelitian Dasar DP3M Ditjen Dikti*). Surakarta: Lembaga Penelitian UMS.
- Prayitno, Harun Joko. 2007. "Realisasi Bentuk Tindak Tutur Direktif dalam Peristiwa Rapat Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Berbudaya Jawa" dalam *Kajian Linguistik dan Sastra*, Volume 19, Nomor 2 Desember 2007, Jurusan PBSID dan PBI, FKIP, UMS.
- Prayitno, Harun Joko. 2009. "Perilaku Tindak Tutur Berbahasa Pemimpin dalam Peristiwa Rapat Dinas: Kajian Pragmatik dengan Pendekatan Gender" dalam *Kajian Linguistik dan Sastra*, Volume 21, Nomor 2 Desember 2009, Jurusan PBSID dan PBI, FKIP, UMS.

- Rubin, Herbert. 1995. *Qualitative Interviewing; The Art of Hearing Data*. London: Saga Publication.
- Subroto, Edi. 1991. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik*. Surakarta: UNS Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sutopo, H.B. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Verhaar, J.W.M. 2002. *Asas-asas Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 2004. "Teori Kesantunan dan Humor" dalam *Seminar Nasional III; Pragmatik dan Makna Interaksi Sosial*, 28 Agustus 2004. Surakarta: Pascasarjana UNS.